

RAKORNAS PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2026

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Oleh:

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI

Jakarta, 25 Februari 2026





RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (SICC), KAB. BOGOR , 2 FEBRUARI 2026



Total Jumlah Peserta
Rakornas

4.011

Orang

Peserta
Instansi Pusat : 525

Peserta
Instansi Daerah : 3.486

1.013 Orang KDH dan WKDH
464 Orang DPRD, DPRA, DPRP, dan DPRK
486 Orang Jajaran TNI Tingkat Provinsi & Kab/Kota
480 Orang Jajaran Polri Tingkat Provinsi & Kab/Kota
425 Orang Jajaran Kejaksaan Tingkat Provinsi & Kab/Kota
36 Orang Jajaran Kabinda Tingkat Provinsi & Kab/Kota
34 Orang Jajaran BI Tingkat Provinsi & Kab/Kota
548 Orang Jajaran BPS Tingkat Provinsi & Kab/Kota

**Presiden dan Wapres,
Menko, Wamenko Menteri dan Wamen
Kabinet Merah Putih,**

Ketua DEN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kabin, Pimpinan Wakil Pimpinan Lembaga, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Eselon I K/L, Perwakilan Pejabat Utama Mabes TNI, Mabes Polri, Mabes AD, AL & AU, KDH dan Wakil KDH, DPRD, DPRA, DPRP Provinsi dan Kab/Kota, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPS

Poin utama Rakornas:

- Ketahanan Pangan dan Energi.** Pemerintah menargetkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan cadangan nasional, serta mendorong kemandirian energi melalui optimalisasi sumber energi dalam negeri dan percepatan transisi energi.
- Peningkatan Kualitas SDM.** Dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis untuk deteksi dini, serta penguatan pendidikan termasuk Sekolah Rakyat dan digitalisasi pembelajaran.
- Penguatan Ekonomi Nasional.** Fokus pada pengembangan koperasi desa/kelurahan, hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
- Pembangunan Berbasis Wilayah dan Lingkungan.** Dilaksanakan melalui pembentukan **Kampung Nelayan Merah Putih untuk ketahanan protein laut, serta Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) termasuk pembangunan waste to energy dan penanganan sampah terpadu.**
- Pengentasan Kemiskinan.** Dilakukan melalui integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih berkelanjutan.
- Penguatan Politik Luar Negeri.** Menjalankan politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat kerja sama internasional di bidang perdagangan dan keamanan.

Rakornas bertujuan untuk memberikan arahan strategis dan memastikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Nasional yang dirumuskan dalam Asta Cita sebagai landasan bagi Indonesia Emas 2045.

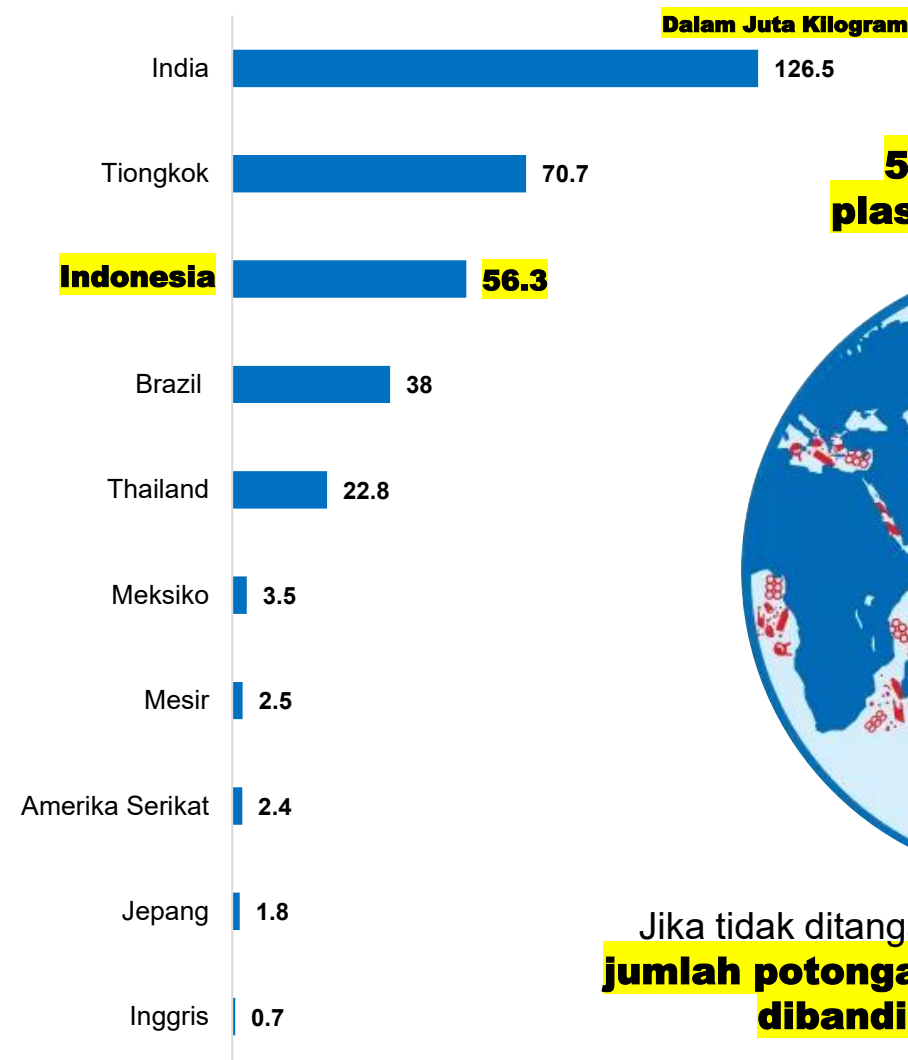


PERBANDINGAN DATA JUMLAH SAMPAH BEBERAPA NEGARA DI DUNIA

10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia Tahun 2020



10 Negara Penghasil Sampah Plastik di Laut Terbesar Di Dunia Tahun 2022

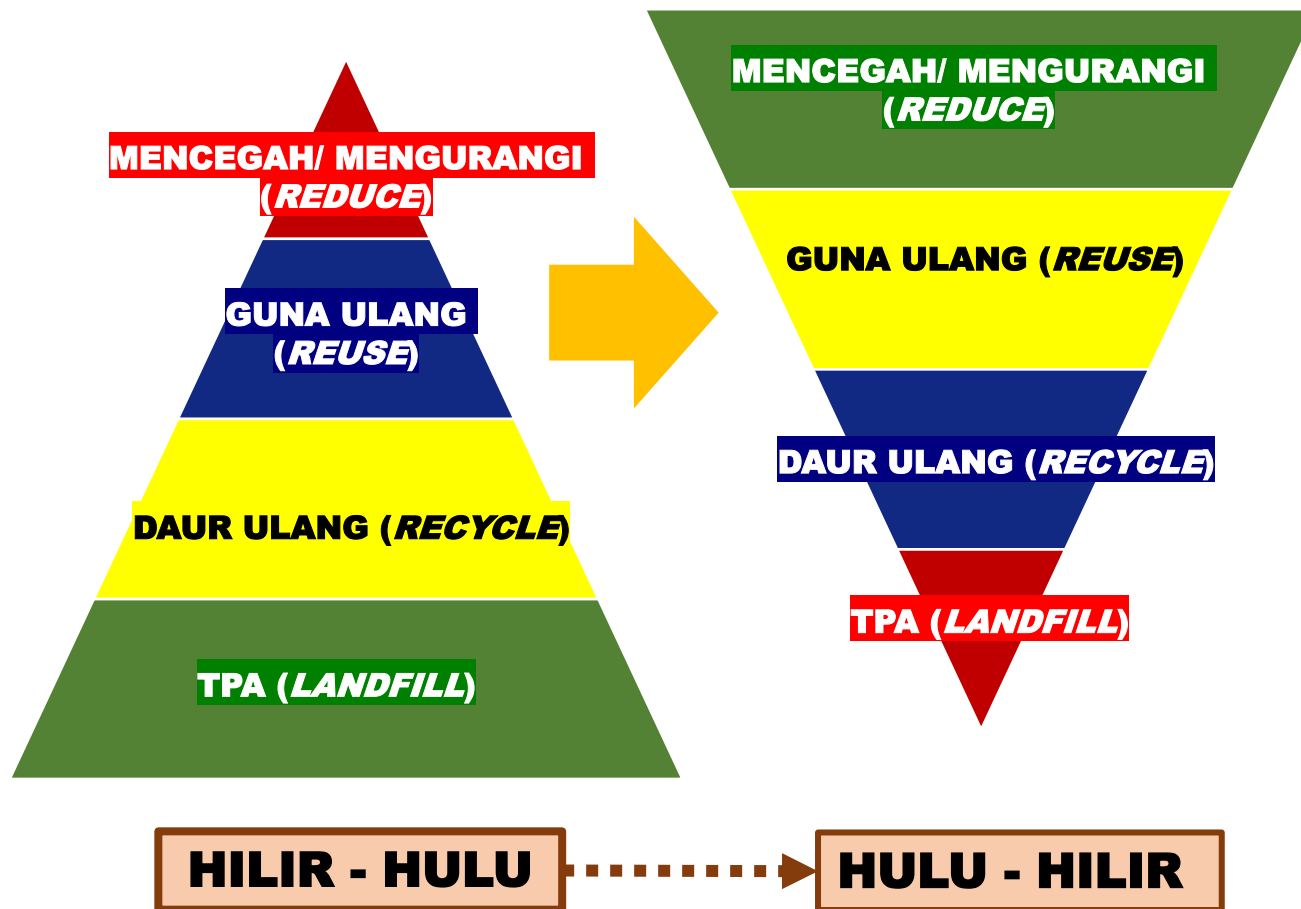


5 Triliun potongan plastik mengapung di dunia



Jika tidak ditangani, diprediksi pada **tahun 2050 jumlah potongan sampah akan lebih banyak dibanding jumlah ikan di laut**

TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH



“Adanya perubahan Paradigma yang semula volume timbunan sampah bermuara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), diubah menjadi seminimal mungkin volume sampah di TPA melalui proses 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) oleh masyarakat”

Masyarakat Harus Berperan Sejak Awal

Masyarakat harus memilah sampah yang akan dibuang → Membedakan sampah organik dan anorganik

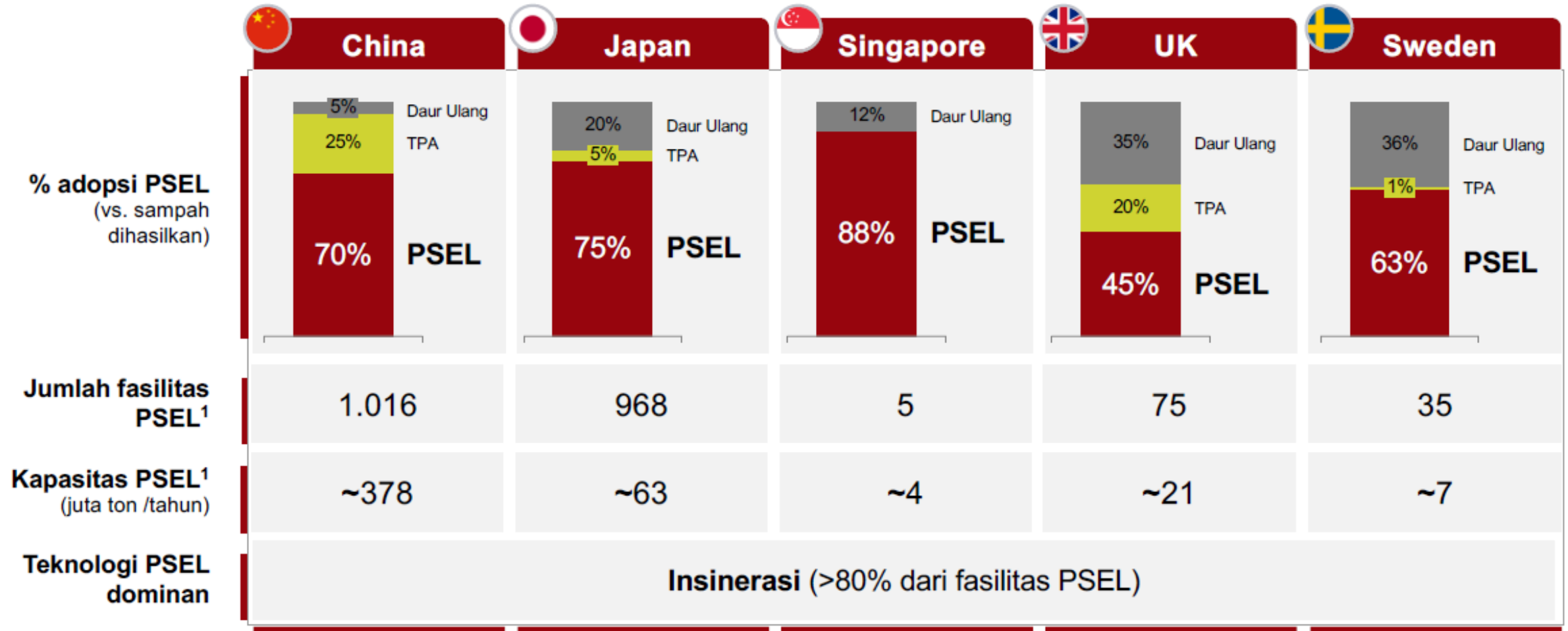
- **Sampah organik dan anorganik** yang bisa didaur ulang dapat dijual ke bank sampah
- **Sampah yang tidak bisa didaur ulang** dapat dibawa ke Tempat pembuangan Sementara (TPS)
- **Tersedianya tempat-tempat pembuangan sampah** berupa kontainer tertutup sehingga tidak keluar bau busuk sampah dan menjaga pemandangan kota dari sampah
- **Tempat Pembuangan Akhir (TPA)** dikelola dengan baik, menggunakan metode *sanitary landfill*, bukan dengan cara *open dumping*
- **Pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi kompos** mengurangi volume sampah sebelum di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebagai energi pengganti *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, dan dapat menjadi pembangkit listrik tenaga sampah

SKEMA RENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

ASPEK	PROGRAM WASTE TO ENERGY PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK	LOCAL SERVICE DELIVERY IMPROVEMENT PROJECT (LSDP)
	Kapasitas Input sampah 1000 Ton/Hari	Input Sampah 100 - 120 Ton/Hari
	Output Energi Listrik	RDF (<i>Refuse Derived Fuel</i>), Kompos, <i>Black Soldier Fly</i> (BSF)/Maggot
	Offtaker Penyedia layanan listrik negara/PLN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RDF (<i>Refuse Derived Fuel</i>): Pabrik Semen, ▪ Kompos: Perkebunan, Pertanian, dan Pertamanan ▪ <i>Black Soldier Fly</i> (BSF): Peternakan dan Perikanan
	Partisipasi Masyarakat Tidak Ada	Dilaksanakan di tingkat Hulu (Rumah Tangga)
	Transportasi Alat angkut sampah dari Pemda dan dibutuhkan jumlah alat angkut tambahan oleh Pemda	Alat angkut sesuai dengan jumlah Timbulan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan dari TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
	Teknologi PSEL (Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Refuse Derived Fuel (RDF) ▪ Komposting (Sampah organik menjadi kompos) ▪ Biodigester: Sistem kedap udara yang memproses limbah organik menggunakan mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen (anaerobik) untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik)
	Retribusi Sampah Tidak menjadi target intervensi PSEL	Menjadi target intervensi Program
	Kelembagaan Pengelola Badan Usaha Pengelola dan Pengembang (BUPP) PSEL (Pembentukan Badan Baru)	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah (Pengembangan UPTD menjadi BLUD)
	Kerjasama Kerjasama antar daerah atau skala regional	Kerjasama dengan Offtaker atau Operator Pengelola, tidak diperlukan kerjasama antar daerah, karena kebutuhan input sampah kecil (100 – 200 ton per hari)

PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK (PSEL)

SEBAGAI SOLUSI JANGKA PANJANG UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH DI BEBERAPA NEGARA



Sumber: Danantara Indonesia; Ecoprog (2025); Huajiang Intelligence; Ministry of Environment Japan; Energy Market Authority Singapore; UK electric production database; Energiaret Sweden, diolah 24 Februari 2026

KEWAJIBAN DAN RISIKO UTAMA UNTUK PSEL DIKELOLA PEMDA

Kewajiban dan Risiko Utama

Deskripsi Peran Pemda

Kewajiban utama Pemda	Parameter lahan dan lokasi	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL• Memastikan lokasi memenuhi kebutuhan infrastruktur termasuk di antaranya akses air, jalan, jaringan listrik, izin ketinggian
	Pasokan sampah	<ul style="list-style-type: none">• Menjamin ketersediaan volume sampah paling sedikit 1.000 ton per hari selama operasional PSEL• APBD untuk pengelolaan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah ke PSEL.• Akses kepada pasokan sampah di kota-kota lain – perlu koordinasi dengan Pemda
Risiko utama Pemda	Wanprestasi pasokan sampah	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian kerja sama wajib memuat ketentuan kompensasi apabila ketersediaan sampah tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati
	Terminasi lebih awal	<ul style="list-style-type: none">• Jika terjadi pemutusan kontrak lebih awal karena Pemda tidak memenuhi kewajiban kontrak atau karena risiko politik/pemerintah, Pemda wajib membeli proyek/pembangkit pada nilai wajar (<i>fair value</i>) untuk menghindari stranded asset
	Keadaan kahar (force majeure)	<ul style="list-style-type: none">• Dalam keadaan kahar, risiko ditanggung bersama oleh Pemda dan investor sesuai perjanjian kerja sama

USULAN LOKASI PRIORITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK (PSEL)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Tahun 2024 (ton/hari)	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024*	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah*
1	Kota Adm. Jakarta Timur	3.092.867	2.353,55	2,702 (Prov DKI Jakarta)	Tinggi
2	Kota Adm. Jakarta Barat	2.556.752	2.103,31	2,702 (Prov DKI Jakarta)	Tinggi
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	2.409.380	1.987,74	2,702 (Prov DKI Jakarta)	Tinggi
4	Kota Surabaya	3.018.022	1.810,81	2,702	Sangat Tinggi
5	Kota Medan	2.474.166	1.731,92	2,766	Sangat Tinggi
6	Kota Bekasi	2.526.133	1.768,29	1,692	Sangat Tinggi
7	Kota Bandung	2.579.837	1.496,31	1,846	Sangat Tinggi
8	Kota Tangerang	2.543.504	2.187,41	1,874	Sangat Tinggi
9	Kota Adm. Jakarta Utara	2.017.020	1.396,42	2,702 (Prov DKI Jakarta)	Tinggi
10	Kota Depok	2.163.640	1.363,09	2,231	Sangat Tinggi
11	Kota Palembang	1.772.492	1.240,74	1,349	Sedang
12	Kota Semarang	1.699.585	1.189,71	2,341	Sangat Tinggi
13	Kota Makassar	1.470.261	1.032,1	2,490	Sangat Tinggi
14	Kota Adm. Jakarta Pusat	1.125.497	855,38	2,702 (Prov DKI Jakarta)	Tinggi
15	Kota Tangerang Selatan	1.420.348	1.022,65	2,434	Tinggi
16	Kota Pekanbaru	1.123.348	1.011,01	2,272	Sangat Tinggi
17	Kota Denpasar	755.600	1.004,95	1,358	Sedang
18	Kota Bandar Lampung	1.100.199	770,14	1,321	Sedang
19	Kota Bogor	1.127.408	755,36	1,554	Tinggi
20	Kota Malang dan sekitarnya	3.878.654	1.707,23		
	Kota Malang	1.167.551	731,24	1,598	Tinggi
	Kabupaten Malang	2.711.103	975,99	1,191	Rendah
21	Kota Padang dan sekitarnya	1.501.785	899,95		
	Kota Padang	939.851	629,70	0,897	Sangat Rendah
	Kota Pariaman	102.765	40,67	0,852	Sangat Rendah
	Kabupaten Padang Pariaman	459.169	229,58	0,685	Sangat Rendah
22	Kota Samarinda dan sekitarnya	1.674.356	987,27		
	Kota Samarinda	881.225	616,86	4,059	Sangat Tinggi
	Kabupaten Kutai Kartanegara	793.131	370,41	2,122	Sangat Tinggi
23	Kota Balikpapan dan sekitarnya	974.485	640,49		
	Kota Balikpapan	772.418	540,69	2,834	Sangat Tinggi
	Kabupaten Penajam Paser Utara	202.067	99,80	1,788	Sangat Tinggi
24	Kota Banjarmasin dan sekitarnya	2.235.467	1.278,40		
	Kota Banjarmasin	679.637	475,75	2,175	Sangat Tinggi
	Kabupaten Banjar	584.684	365,43	1,260	Sedang
	Kabupaten Barito Kuala	334.266	100,28	1,272	Sedang
	Kota Banjarbaru	272.763	190,93	1,841	Sangat Tinggi
	Kabupaten Tanah Laut	364.117	145,65	2,312	Sangat Tinggi

*J) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Tahun 2024 (ton/hari)	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024*	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah*
25	Kota Jambi dan sekitarnya	1.878.347	1.067,94		
	Kota Jambi	639.986	447,99	1,423	Tinggi
	Kabupaten Muaro Jambi	483.802	193,52	1,237	Sedang
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	335.257	166,38	1,695	Sangat Tinggi
	Kabupaten Batanghari	419.302	260,05	1,521	Tinggi
26	Kota Pontianak dan sekitarnya	1.879.813	1.037,94		
	Kota Pontianak	686.604	411,96	1,646	Sangat Tinggi
	Kabupaten Kubu Raya	632.949	445,21	1,212	Sedang
	Kabupaten Mempawah	314.148	83,56	1,234	Sedang
	Kota Singkawang	246.112	97,21	1,249	Sedang
27	Kota Surakarta dan sekitarnya	3.799.376	1.821,77		
	Kota Surakarta	587.646	420,17	1,866	Sangat Tinggi
	Kabupaten Sukoharjo	916.472	365,58	1,067	Rendah
	Kabupaten Klaten	1.300.142	653,97	1,057	Rendah
	Kabupaten Karanganyar	995.116	382,05	1,016	Rendah
28	Kota Yogyakarta dan sekitarnya	2.553.164	1.368,32		
	Kota Yogyakarta	415.605	332,48	1,661	Sangat Tinggi
	Kabupaten Sleman	1.157.290	601,79	1,546	Tinggi
	Kabupaten Bantul	980.269	434,05	1,263	Sedang
29	Kota Manado dan sekitarnya	1.182.080	643,2		
	Kota Manado	485.335	296,05	1,462	Tinggi
	Kabupaten Minahasa Utara	240.967	120,48	1,192	Sedang
	Kabupaten Minahasa	353.054	175,13	0,917	Rendah
	Kota Tomohon	102.724	51,54	1,370	Sedang
30	Kab. Bogor	5.682.303	2.841,15	2,070	Sangat Tinggi
31	Kab. Tangerang	3.804.305	2.663,01	1,861	Sangat Tinggi
32	Kab. Bekasi	3.237.420	1.683,46	1,659	Sangat Tinggi
33	Kab. Serang	1.715.094	1.200,56	1,166	Sedang

Catatan:

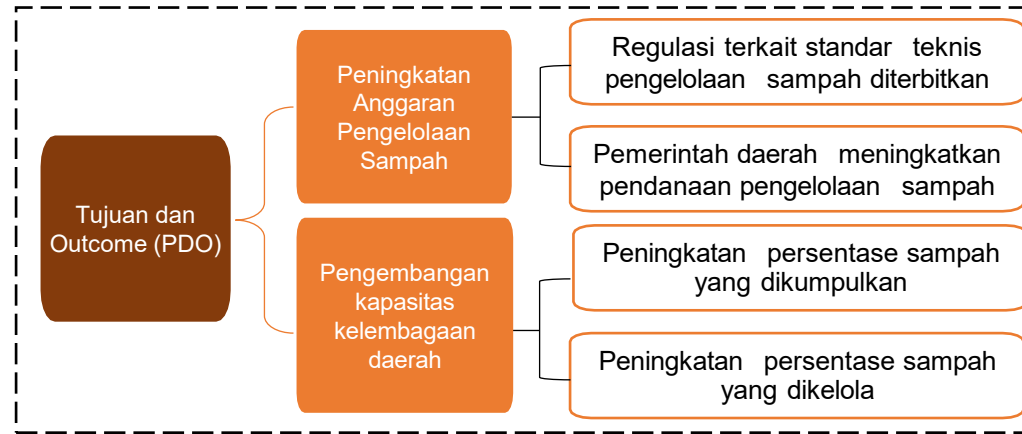
1. Terdapat 20 Kab/Kota dengan jumlah timbulan sampah lebih dari 1000 ton per hari
2. Seluruh daerah yang masuk dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Ditetapkan 12 April 2018) masuk dalam daftar lokasi prioritas PSEL
3. Dibuka opsi jika ada penambahan lokasi baru selama memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan dalam Perpres

LOCAL SERVICE DELIVERY IMPROVMENT PROJECT (LSDP) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

LATAR BELAKANG

Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah per tahun, dan angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% dalam kurun waktu 12 tahun ke depan. Indonesia berada dalam kondisi darurat sampah, dimana Kemen PPN/Bappenas memperkirakan bahwa **pada tahun 2028, seluruh TPA di Indonesia akan penuh**. Hal inilah yang menciptakan urgensi untuk pengelolaan sampah secara mandiri oleh daerah, dimana daerah tingkat Kabupaten/Kota merupakan pihak yang paling awal terlibat dalam pengelolaan sampah.

TUJUAN DAN *OUTCOME* PROYEK



OUTPUT PROYEK

Komponen I

- Persentase Pemda yang memasukkan pengelolaan sampah sebagai sektor prioritas dalam rencana kerja tahunan (RKPD).
- Pedoman nasional untuk RIPS daerah diperbarui

Komponen II

- Persentase Pemda yang telah memiliki, memperbarui, atau menerbitkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang mencakup pertimbangan manajemen risiko bencana dan perubahan iklim, serta umpan balik dari masyarakat
- Jumlah masyarakat yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko iklim
- Persentase Pemda yang memiliki/menerbitkan Perda tentang tarif sampah
- Persentase Pemda dengan peningkatan anggaran (APBD) untuk pengelolaan sampah
- Persentase Pemda dengan peningkatan penerimaan tarif sampah untuk pengelolaan sampah
- Persentase Pemda yang telah membentuk operator independen untuk pengelolaan sampah di akhir proyek
- Persentase rumah tangga dengan praktik pemilahan sampah yang lebih baik setelah intervensi proyek
- Persentase investasi pengelolaan yang didukung oleh proyek dengan SOP yang sensitif terhadap gender
- Jumlah pekerja perempuan formal di sektor sampah di Pemda menggunakan alat pelindung diri saat bekerja

PEMANGKU KEPENTINGAN



Masyarakat

- Kampanye publik, pemecuan perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat dalam pemilahan sampah tingkat rumah tangga
- Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah (Bank Sampah/TPS3R, & alat angkut)



Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Perkada (RIPS, Retribusi, Pengelolaan Sampah, pembentukan UPTD)
- Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan, & Fasilitas kerjasama offtaker
- Sosialisasi dan Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah (Bank Sampah/TPS3R, & alat angkut)



Pemerintah Pusat

- Penyusunan Regulasi, penyusunan SOP dan panduan pengelolaan persampahan (RIPS, retribusi, Jakstrada, perda persampahan, Pembentukan UPTD/BLUD)
- Pengembangan sistem dan database informasi persampahan terintegrasi SIPD dan SIPSN



Pelaku Usaha

- MoU kerjasama produk pengelolaan sampah dengan pelaku usaha/pihak ketiga
- *Market Sounding* produk pengolahan sampah kepada offtaker

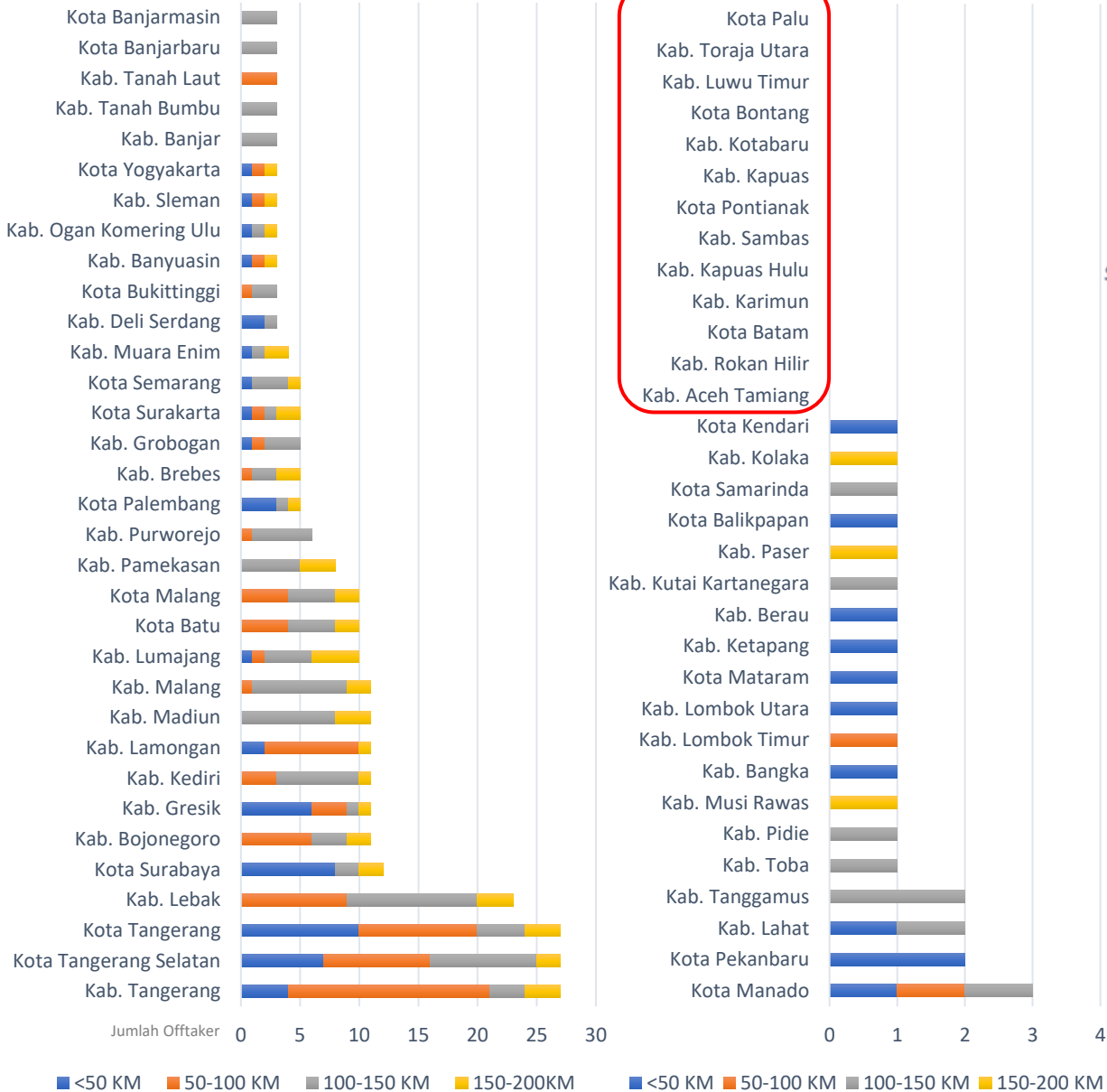
ALOKASI

Komp	Kegiatan	Alokasi DK	%
1	<i>Development of Central and Regional Waste Management Policies</i>	\$ 15.000.000	4,29%
2	<i>Performance Based Grant (to be procured at the local level, divided into approximately 30 LGs)</i>	\$ 300.000.000	85,71%
3	<i>Management Project</i>	\$ 35.000.000	10%

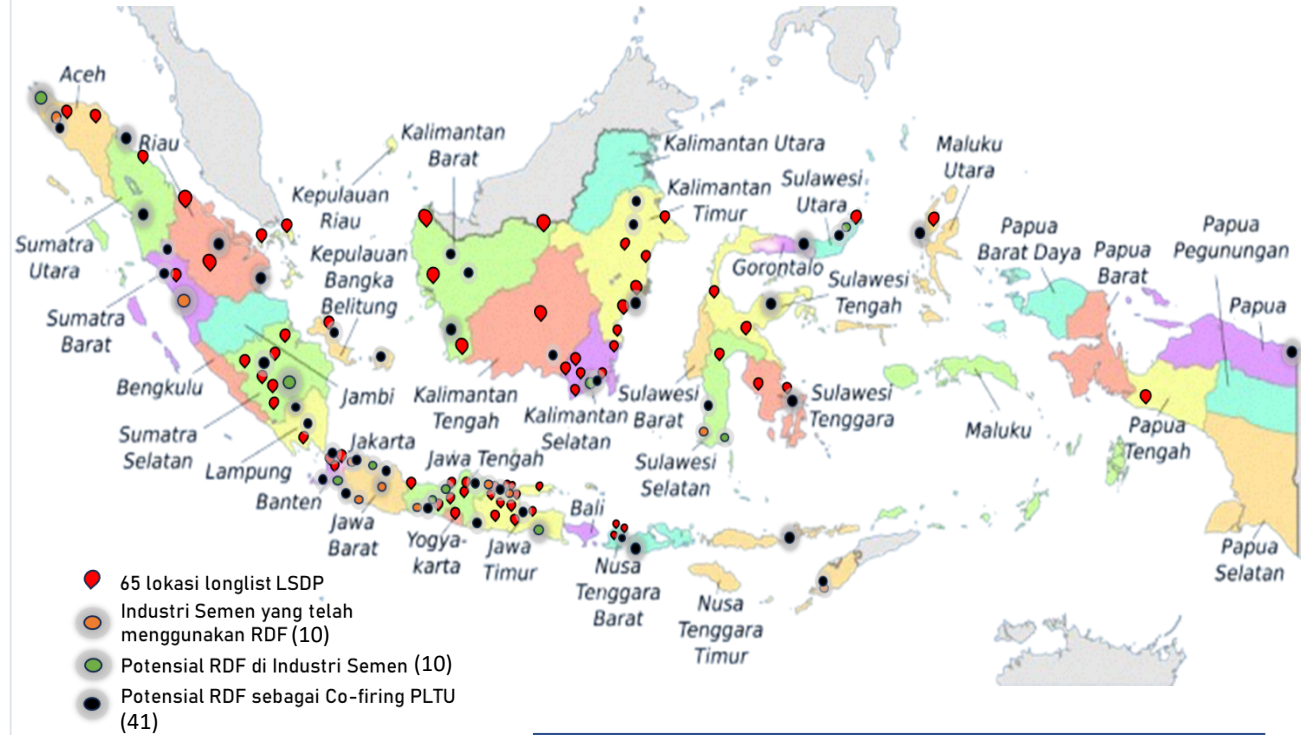
Komponen III

- Pengaduan yang ditangani dalam standar yang telah ditetapkan
- Jumlah kemitraan sektor swasta yang terbentuk

LOKASI LOCAL SERVICE DEVELOPMENT PROGRAM (LSDP) DAN POTENSI OFFTAKER



PEMETAAN OFFTAKER RDF DI LOKASI LONGLIST



JARAK OFFTAKER RDF (*Refuse-Derived Fuel*)

- Diantara 65 longlist kota/kabupaten LSDP:
- 50 lokasi terletak dalam radius 0 - 200 km dari potential RDF offtaker (Industri Semen dan Co-firing PLTU)
 - 15 lokasi yang tidak memiliki potensial offtaker untuk RDF, dan akan menggunakan teknologi lain (composting, maggot, dan *Black Soldier Fly (BSF)*)

Sumber: Studi RDF Peluang dan tantangan dalam praktik pengelolaan sampah, ISWMP, WB



DAFTAR 65 DAERAH CALON PESERTA *LOCAL SERVICE DEVELOPMENT PROGRAM (LSDP)*

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Jawa Timur	Kota Malang
2	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
3	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
4	Sumatera Selatan	Kota Palembang
5	Kepulauan Riau	Kota Batam
6	Riau	Kota Pekanbaru
7	Sulawesi Tengah	Kota Palu
8	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru
9	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
10	Banten	Kab. Tangerang
11	Jawa Tengah	Kota Semarang
12	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman
13	Jawa Timur	Kab. Lumajang
14	Jawa Timur	Kab. Madiun
15	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu
16	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut
17	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur
18	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu
19	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara
20	Banten	Kota Tangerang
21	Banten	Kota Tangerang Selatan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
22	Jawa Tengah	Kota Surakarta
23	Sulawesi Utara	Kota Manado
24	Jawa Timur	Kab. Gresik
38	Jawa Timur	Kab. Malang
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang
27	Aceh	Kab. Aceh Tamiang
28	Jawa Timur	Kota Batu
29	D.I Yogyakarta	Kota Yogyakarta
30	Kalimantan Timur	Kota Bontang
31	Jawa Tengah	Kab. Brebes
32	Lampung	Kab. Tanggamus
33	Jawa Timur	Kab. Kediri
34	Jawa Tengah	Kab. Grobogan
35	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur
36	Jawa Timur	Kab. Lamongan
37	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro
38	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
39	Jawa Timur	Kab. Pamekasan
40	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin
41	Jawa Tengah	Kab. Purworejo
42	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara
43	Riau	Kab. Rokan Hilir
44	Kalimantan Barat	Kab. Sambas

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
45	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim
46	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
47	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang
48	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar
49	Aceh	Kab. Pidie
50	Sumatera Selatan	Kab. Lahat
51	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas
52	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
53	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu
54	Kepulauan Bangka	Kab. Bangka
55	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru
56	Papua Tengah	Kab. Mimika
57	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
58	Kalimantan Timur	Kab. Paser
59	Kalimantan Timur	Kab. Berau
60	Kepulauan Riau	Kab. Karimun
61	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara
62	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka
63	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara
64	Jawa Timur	Kota Surabaya
65	Kalimantan Timur	Kota Samarinda

Note:

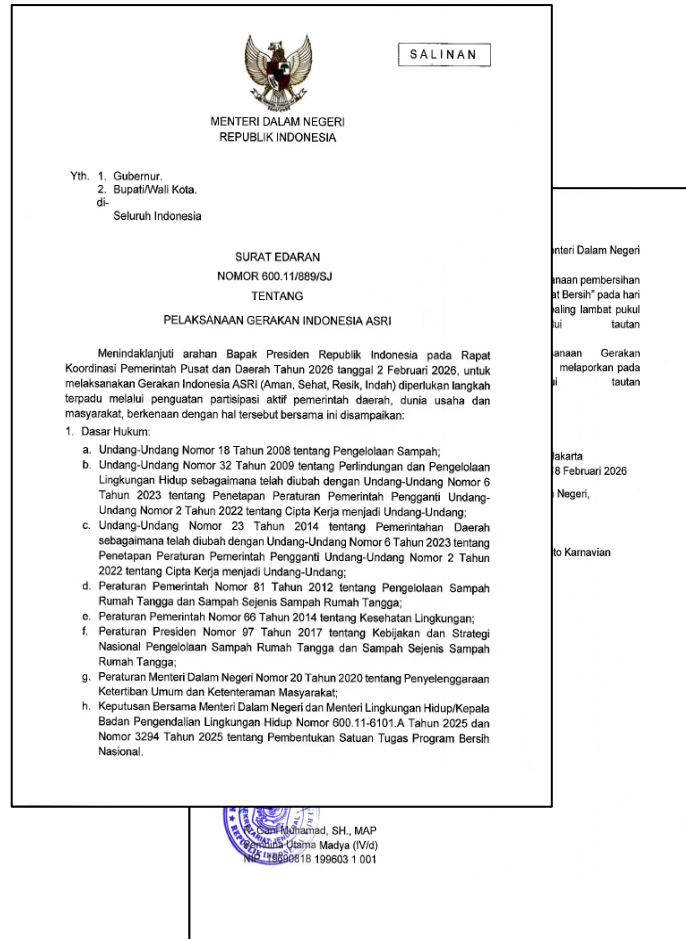
- Terdapat 65 lokasi yang lolos penapisan dan 28 daerah didanai melalui On-Granting
- Pendanaan melalui dana on-granting terdapat 65 longlist daerah, untuk pilot terdapat 28 daerah
- *Pendanaan melalui Tugas Perbantuan terdapat 2 Kabupaten, yaitu Lebak dan Toba*
- *Total daerah LSDP: 30 daerah yang dilaksanakan pada tahun 2025-2029*

Kota/Kabupaten: Usulan Lokasi PSEL





SE MENDAGRI NO. 600.11/889/SJ TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI (DITETAPKAN PADA 18 FEBRUARI 2026)



Poin Penting:

Tujuan

- Mendorong pelaksanaan **Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)** sebagai gerakan nasional.
- Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan

- Melibatkan ASN, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha & masyarakat.
- Gubernur: pembinaan & koordinasi lintas kab/kota.
- Bupati/Wali Kota: koordinasi hingga kecamatan & desa/kelurahan.
- Kegiatan rutin:
 - **Selasa: kebersihan lingkungan kantor.**
 - **Jumat: kebersihan ruang publik (tanpa ganggu layanan).**

Monitoring & Pelaporan

- Dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah.
- Pelaporan mingguan & bulanan melalui sistem nasional.
- Pemberian apresiasi bagi pelaksana terbaik.

Fokus Gerakan:

Aman

- Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana
- Pengamanan lingkungan & ketertiban ruang public
- Pengendalian sampah & limbah berbahaya

Sehat

- Sanitasi & penyediaan air bersih
- Pengendalian pencemaran lingkungan
- Penguatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Resik

- Kerja bakti pembersihan lingkungan
- Pengelolaan sampah berbasis sumber
- Inspeksi kebersihan lingkungan kerja

Indah

- Penanaman pohon & penghijauan
- Penataan taman & ruang public
- Penertiban reklame/baliho
- Peremajaan bangunan yang tidak estetik



CONTOH DAERAH YANG SUDAH MENINDAKLANJUTI SE MENDAGRI NO. 600.11/889/SJ TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI (DITETAPKAN PADA 18 FEBRUARI 2026)



Daftar Pemda yang menindaklanjuti SE Mendagri tentang Indonesia ASRI

Yang Sudah
Prov : 7
Kab : 131
Kota : 72

No	Prov.
1	Sulut
2	Kalteng
3	Banten
4	Jambi
5	Sumut
6	Jateng
7	Bali



Yang belum
Prov : 31
Kab : 285
Kota : 26



CONTOH SPANDUK, BALIHO, VIDEOTRON DAN BILLBOARD DI BEBERAPA NEGARA

London, Inggris



New York, Amerika Serikat



Tokyo, Jepang



CONTOH PEMASANGAN SPANDUK DAN BALIHO YANG TIDAK TERTATA DI INDONESIA

Jawa Barat



Bali



Yogyakarta



Jawa Barat



Bali



Yogyakarta



23 Agu 2023 09.41.36
7 - Jalan C. Simaniuntak



CONTOH PEMASANGAN SPANDUK, BALIHO, VIDEOTRON DAN BILLBOARD YANG BAIK DI INDONESIA



Bandung, Jabar



Semarang, Jateng



DKI Jakarta



Bandung, Jabar



DKI Jakarta



DKI Jakarta

PELIBATAN LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



SATPOL PP GOES TO SCHOOL



INOVASI DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA



PELIBATAN SATLINMAS DALAM LAYANAN TRANTIBUMLINMAS KEPADA MASYARAKAT KELOMPOK RENTAN





CONTOH PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK OLEH KOTA SURABAYA

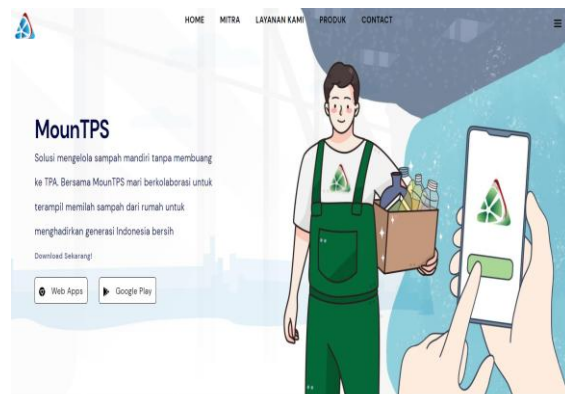
MOUNTPS, LAYANAN APLIKASI DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH PENGELOLAAN SAMPAH

CONTOH INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BALIKPAPAN

CONTOH PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN MAGGOT DI DESA RANDU, BATANG – JAWA TENGAH

SURABAYA CONTOH KOTA PENGELOLAAN SAMPAH TERBAIK INDONESIA

Admin dlh | 15 Oktober 2019 | 2035 kali



Sumber: <https://www.merdeka.com>, Juni 2022

Zero Waste To Landfill Strategi Pengelolaan Sampah di Pasar Pandan Sari Balikpapan Inovasi Mahasiswi Planologi ITK

by humas itk | Sep 3, 2021 | Aktifitas Mahasiswa, Kegiatan-ITK, Penelitian-ITK, Perencanaan Wilayah dan Kota, Uncategorized | 0 comments



Sumber: <https://itk.ac.id>, Juni 2022



Sumber: <https://www.kompasiana.com/giat12randu6285/68938323ed641558a52c3642/ab>, Agustus 2025



Sumber: <https://dlh.bulelengkab.go.id>, Juni 2022



PENGELOLAAN SAMPAH KAB. BANYUWANGI, PROV. JATIM

Melihat Pengelolaan Sampah di 6 Desa Pesisir Banyuwangi,
Bernilai Jual hingga Untungkan Warga Sekitar



Sumber: <https://regional.kompas.com>, Juni 2022

HI TRASH, APLIKASI ANTAR JEMPUT SAMPAH KAB. BANYUMAS, PROV JATENG

Awalnya Dicibir, Inilah Hi Trash, Aplikasi Antar Jemput Sampah Ciptaan Mahasiswa

oleh L Darmawan [Banyumas] di 29 February 2020

f t in e



Sumber: <https://www.mongabay.co.id>, Juni 2022

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT KAB. KLUNGKUNG, PROV BALI

UMUM

Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Jadi Alternatif
Solusi Penanganan Limbah



Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Gema Santi Klungkung mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas RI, sebagai salah satu aksi pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor limbah

Sumber: <https://bappeda.baliprov.go.id>, Juni 2022



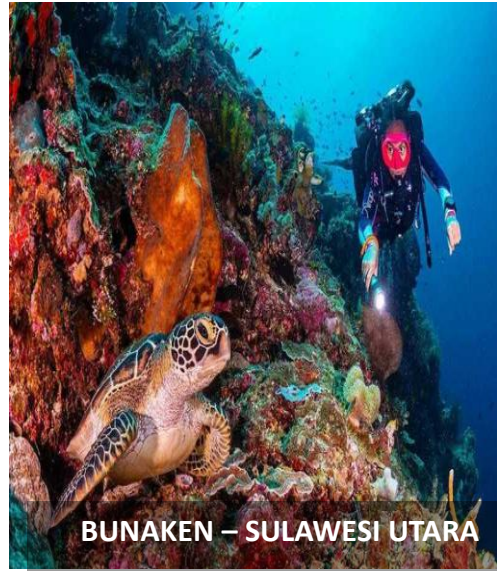
MENDAGRI TINJAU PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS BUMDES DAN MELIBATKAN MASYARAKAT DI DESA WANTILAN KAB. SUBANG PROV. JABAR SELASA 21 JANUARI 2025







KITA HARUS MENJAGA KEKAYAAN ALAM LAUT YANG ADA





bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id